

RINGKASAN

Nama : M. Fauzi
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah
(Studi Putusan Nomor 93/Pdt.G/2015/Ms-Aceh)

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Yulia, S.H., M.H)

Perlawanan Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Demikian juga hibah diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 210 . Namun permasalahan yang ada dalam putusan nomor 93/Pdt.G/2015/Ms-Aceh ini yaitu pertimbangan hakim terkait harta yang telah dihibahkan ini keliru, dimana si penerima hibah di atas tanah hibah tersebut sudah dibangun rumah permanen sebagai tempat tinggal ibu dan anak, oleh karenanya ini bertentangan dengan ketentuan di dalam KUH Perdata terkait pemabatalan hibah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim Dan akibat hukum terhadap pembatalan hibah dalam pokok perkara Nomor : 93/Pdt.G/2015MS-Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah dalam kasus ini memutuskan di terimanya pembatalan hibah terhadap akta hibah No. 643/280.2006 dengan syarat pemberi hibah mengganti kerugiannya. Merujuk kepada Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan tiga kriteria; pertama tidak memenuhi syarat, kedua melakukan kesalahan, ketiga menolak memberikan nafkah si penghibah. Namun dalam kasus ini terbukti si penerima tidak melanggar apapun dari ketiga kriteria tersebut, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hibah ini tidak dapat ditarik kembali.

Disarankan kepada hakim seharusnya lebih teliti dalam menafsirkan hukum dimana si penerima hibah sudah menjalankan kewajibannya sebagai anak dari si pemberi hibah. Kepada pihak pemberi hibah hendaknya melaksanakan perjanjian hibah itu dengan persetujuan ahli waris sehingga tidak terjadi konflik dan ahli waris yang dirugikan, dan sebaiknya ketika membuat akad hibah dimasukkan syarat-syarat tambahan untuk keperluan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlawanan Tereksekusi, Sita Eksekusi.

SUMMARY

Name : M.Fauzi
Study Program : Master of Law
Thesis Title : Legal Considerations By Judge In Cancellation Of Grant
(Decision Study Number 93/Pdt.G/2015/MS-Aceh)

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Yulia, S.H., M.H)

A gift is a gift made by someone to another party which is done while they are still alive and carried out while the grantor is still alive. Grants are regulated in Article 1688 of the Civil Code. Likewise, grants are regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), namely Article 210. However, the problem in decision number 93/Pdt.G/2015/MS-Aceh is that the judge's consideration regarding the property that has been donated is wrong, where the recipient of the gift has built a permanent house on the donated land as a place for mother and child to live. therefore this is contrary to the provisions in the Civil Code regarding cancellation of grants.

This research aims to find out and analyze the legal considerations by the judge and the legal consequences of grant cancellation in case number: 93/Pdt.G/2015MS-Aceh

This research uses normative juridical methods, data collection is obtained qualitatively, data is obtained from primary data and secondary data and the data will be analyzed, then the results of the research are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.

The results of this research explain that the judge's consideration of grant cancellation in this case decided whether to accept the grant cancellation of grant deed No. 643/280.2006 with the condition that the grantor compensates for the losses. Referring to Article 1688 states that a gift cannot be withdrawn except under three criteria; firstly not fulfilling the requirements, secondly making a mistake, thirdly refusing to provide support to the donor. However, in this case it was proven that the recipient did not violate any of these three criteria, so it can be simply concluded that this gift cannot be withdrawn.

It is recommended that judges should be more careful in interpreting the law where the recipient of the grant has carried out his obligations as the child of the grantor. The party giving the gift should carry out the gift agreement with the consent of the heirs so that there is no conflict and the heirs will be harmed, and it is best when making the gift agreement to include additional conditions for future needs.

Keywords: Legal Protection, Executed Resistance, Confiscated Execution